

DAMPAK PANDEMI COVID 19 BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

Dr. Siti Rohima, SE, M.Si
Dr. Abdul Bashir, SE, M.Si
Mardalena, SE, M.Si



DAMPAK PANDEMI COVID 19 BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

**Dr. Siti Rohima, SE, M.Si
Dr. Abdul Bashir, SE, M.Si
Mardalena, SE, M.Si**



**DAMPAK PANDEMI COVID 19
BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA**

Dr. Siti Rohima, SE, M.Si
Dr. Abdul Bashir, SE, M.Si
Mardalena, SE, M.Si

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2023
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 005.140.1.6.2021
Anggota IKAPI No. 001/SMS/96

83 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-623-399-115-5

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ajar yang berkaitan dengan DAMPAK PANDEMI COVID 19 BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA.

Dalam buku ini ditampilkan beberapa teori dan konsep tentang pertumbuhan ekonomi, pajak, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, permintaan uang, sistem pembayaran dan COVID 19. Diuraikan juga pembahasan sebelum dan saat pandemi COVID 19. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dimohonkan kritik dan saran guna perbaikan yang akan datang.

Palembang, Januari 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I

PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang	1
---------------------	---

BAB II

TEORI DAN KONSEP **6**

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	6
2.2. Teori Penerimaan Pajak	8
2.3. Teori Belanja Modal	13
2.4. Teori Permintaan Uang Keynes	17
2.5. Sistem Pembayaran	19
2.6. Pandemi Covid 19	21

BAB III

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA **23**

3.1. Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Pandemi COVID- 19	23
3.2. Pertumbuhan Ekonomi Saat Pandemi COVID-19	27

BAB IV

PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA **32**

4.1. Penerimaan Pajak Sebelum Pandemi COVID-19	32
4.2. Penerimaan Pajak Saat Pandemi COVID-19	34
BAB V	
PERKEMBANGAN BELANJA MODAL	39
5.1. Belanja Modal Sebelum Pandemi COVOD -19	39
5.2. Belanja Modal Saat Pandemi COVID-19	42
BAB VI	
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN KARTU DEBIT	48
6.1. Transaksi Kartu Debit Sebelum Pandemi COVID-19	48
6.2. Transaksi Kartu Debit Saat Pandemi COVID-19	52
BAB VII	
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT	55
7.1. Transaksi Kartu Kredit Sebelum Pandemi COVID-19	55
7.2. Transaksi Kartu Kredit Saat Pandemi COVID-19	58
BAB VIII	
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN <i>E-Money</i>	62
8.1. Transaksi <i>E-Money</i> Sebelum Pandemi COVID-19	62
8.2. Transaksi <i>E-Money</i> Saat Pandemi COVID-19	65
KESIMPULAN	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB ADHK Tahun 2010 Tahun 2018 – 2019 (Miliar Rupiah) Sebelum Pandemi COVID-19	24
Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB ADHK Tahun Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19 (Miliar Rupiah).....	29
Tabel 4.1. Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018 – 2019 Sebelum Pandemi COVID-19 (Rupiah).....	33
Tabel 4.2. Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19 (Rupiah).....	36
Tabel 5.1. Realisasi Belanja Modal Indonesia Tahun 2018–2019 Sebelum Pandemi COVID-19 (Miliar Rupiah).....	40
Tabel 5.2. Realisasi Belanja Modal Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19 (Miliar Rupiah).....	43
Tabel 6.1. Transaksi Kartu Debit Indonesia Tahun 2018 – 2019 Sebelum Pandemi COVID-19 (Rupiah).....	50
Tabel 6.2. Transaksi Kartu Debit Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Adanya Pandemi COVID-19 (Rupiah)	53
Tabel 7.1. Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2018–2019 Sebelum Pandemi COVID-19 (Rupiah).....	56
Tabel 7.2. Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19 (Rupiah).....	59
Tabel 8.1. Transaksi E-Money Indonesia Tahun 2018 - 2019 Sebelum Pandemi COVID-19 (Rupiah).....	63
Tabel 8.2. Transaksi E-Money Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19 (Rupiah).....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Teori Peacock dan Wiseman	11
Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018– 2019 Sebelum Pandemi COVID 19.....	26
Gambar 3. 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020- 2021 Saat Pandemi COVID-19.....	31
Gambar 4.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018 – 2019 Sebelum Pandemi COVID-19.....	34
Gambar 4.2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19	37
Gambar 5.1. Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal Indonesia Tahun 2018 – 2019 Sebelum Pandemi COVID-19.....	41
Gambar 5. 2. Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19.....	44
Gambar 6.1. Pertumbuhan Transaksi Kartu Debit Indonesia Tahun 2018 – 2019 Sebelum Pandemi COVID- 19.....	52
Gambar 6.2. Pertumbuhan Transaksi Kartu Debit Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19	54
Gambar 7.1. Pertumbuhan Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2018 – 2019 Sebelum Pandemi COVID- 19.....	58
Gambar 7.2. Pertumbuhan Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2020 - 2021 Saat Adanya Pandemi COVID-19	61
Gambar 8.1. Pertumbuhan Transaksi E-Money Indonesia Tahun 2018 - 2019 Sebelum Pandemi COVID- 19.....	64

Gambar 8.2. Pertumbuhan Transaksi E-Money Indonesia
Tahun 2020 - 2021 Saat Pandemi COVID-19 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah berangsur menjadi krisis ekonomi di berbagai negara, terutama di Indonesia. Adanya pembatasan aktivitas pada masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis. Sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang menurun terutama di sektor industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, jasa transportasi dan pergudangan, kinerja ekspor dan impor menurun seiring terhambatnya aktivitas perdagangan antaranegara. Maka dari itu, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan PDB Riil pada kuartal III 2020 sebesar Rp2.720,5 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 5,05 persen, setelah mengalami kontraksi sebesar 4,19 persen pada kuartal sebelumnya dengan PDB Riil Rp2.589,6 triliun, walaupun penurunan tersebut dimulai dari kuartal I 2020. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal II 2020 lalu membaik di kuartal III 2020. Bila dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi, maka

pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan secara konstan dari kuartal I sampai III. Hal ini ditunjukkan pada kuartal I 2019 sebesar Rp2.625,2 triliun, lalu kuartal II 2019 sebesar Rp2.735.3 triliun dan kuartal III sebesar Rp 2.818,8 triliun.

Instrumen pajak dipilih oleh sejumlah negara menjadi salah satu alternatif untuk menyelamatkan perekonomian dalam negeri. Kebijakan pajak dapat digunakan untuk menciptakan insentif yang fleksibel bagi individu dan bisnis, sehingga apabila diterapkan dapat digunakan mengendalikan eksternalitas lingkungan dan lainnya (Craig dan Hines, 2020). Oleh karena itu, pajak sebagai instrumen fiskal dapat memberikan peran yang menyokong ekonomi dalam negeri. Realisasi penerimaan pajak memiliki pengaruh positif dalam jangka waktu pendek maupun panjang terhadap pertumbuhan ekonomi (Sumaryani, 2019). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Sentosa (2018); Saragih (2018); dan Stoilova (2017). Akan tetapi, Penyusunan kebijakan umumnya dilakukan dalam waktu singkat serta keterbatasan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan di saat pandemi. Sehingga pemberian insentif pajak pada saat pandemi rentan terjadi penyelewengan dan tidak tepat sasaran (OECD, 2020).

Pada saat pandemi kebijakan pajak juga dinilai kecil kemungkinan untuk mengatasi masalah negara secara komprehensif

dan berkelanjutan (Craig dan Hines, 2020). Estimasi dampak pandemi COVID-19 masih beragam, pada tahap analisis awal menunjukkan adanya kontraksi PDB terhadap penerimaan pajak akan sangat signifikan (OECD Tax Policy Reform, 2020). Krisis pada tahun 2008 memperkuat pernyataan tersebut dengan menunjukkan adanya penurunan *tax ratio* di saat krisis dan tidak langsung membaik bahkan di saat ekonomi mulai membaik.

Belanja pemerintah juga penting digunakan untuk memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Sehingga stimulus fiskal berupa pemotongan pajak dan tambahan pengeluaran pemerintah dapat memberikan manfaat sangat besar bagi kelompok masyarakat yang paling menderita akibat melemahnya perekonomian akibat pandemi. Belanja modal mengalami peningkatan secara terus menerus baik sebelum dan saat adanya pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak langsung membuat pengerjaan proyek langsung berhenti atau menjadi mangkrak, dilakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan kebijakan pengeluaran yang akan mendorong peningkatan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga mampu dipulihkan secara bertahap seiring dengan pengendalian pandemi COVID-19 maupun dari pemulihan ekonomi. Belanja modal

sangat penting untuk mendorong perkembangan konsumsi, walaupun sempat direlokasi ke belanja subsidi.

Kajian oleh Waryono (2020); Pambudy (2019); Saragih (2018); Triastuti dan Pratomo (2016) bahwa Belanja modal berpengaruh signifikan dengan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berarti semakin besar realisasi belanja modal, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, Fajri (2016), menunjukkan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi.

Selain itu dari sisi moneter dapat dilihat dari perkembangan transaksi alat pembayaran non tunai, baik kartu debit, kartu kredit, dan *e-money*. Saat pandemi *COVID 19* mengalami penurunan sebesar 0,76 persen pada Januari 2020 dibandingkan tahun 2019. Posisi transaksi pembayaran non tunai pada Februari 2020 turun 1,02 persen (yoy). Tercatat transaksi non tunai pada Maret 2020 menurun 4,7 persen (yoy). Pertumbuhan nilai transaksi non tunai pada Juni 2020 masih tercatat kontraksi sebesar 12,80 persen (yoy), meskipun membaik dari pertumbuhan pada Mei 2020 yang terkontraksi 24,46 persen (yoy). Selanjutnya pada bulan Agustus

2020 membaik menjadi 6,86 persen (yoy). Menariknya, pertumbuhan transaksi uang elektronik dan volume transaksi *digital banking* tumbuh tinggi pada bulan Mei masing-masing 17,31 persen (yoy) dan 30,33 persen (yoy), padahal transaksi pembayaran non tunai terkontraksi besar. Pada Januari bahkan mencapai 172,85 persen (yoy). Lalu penggunaan kartu Debit/ATM masih mendominasi transaksi non tunai dengan pangsa 93,16 persen.

Menurut Syarifuddin et al. (2009), besarnya pengaruh kenaikan pembayaran non tunai tersebut terhadap perekonomian, dalam hal ini PDB, masih belum definit. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Nirmala & Widodo (2011) menunjukkan bahwa kenaikan pembayaran non-tunai mampu mempengaruhi pertumbuhan PDB dan sedikit penurunan harga. Terutama adanya fenomena pandemi COVID-19, menyebabkan kecepatan perputaran uang bersifat tidak konstan sehingga belum dapat dipastikan apakah perkembangan pembayaran non tunai berdampak pada perekonomian.

Seberapa besar dampak pandemi Covid-19 bagi perekonomian Indonesia dapat dibandingkan sebelum dan saat terjadinya COVID 19. Dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak dan Belanja Modal dan Penggunaa Transaksi Non Tunai.

BAB II

TEORI DAN KONSEP

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menerangkan faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut satu sama lain saling berinteraksi, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1992:2). Adapun teori pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik (Solow-Swan), Teori Dorongan Kuat (*Big Push Theory*), dan Teori Pertumbuhan Endogen.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik. Karyanya yang paling terkenal, adalah sebuah buku berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan pada 1776. Pada teori ini, Adam Smith menekankan pemupukan modal harus dilakukan terlebih dahulu dibandingkan pembagian kerja. Smith juga menjabarkan bahwa proses pertumbuhan bersifat menggumpal

(kumulatif). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan.

Kemakmuran tersebut akan menarik pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus. Smith menyebut ini sebagai situasi *progresif*. Akan tetapi sekali keuntungan menurun, ia akan terus menurun dan menciptakan keadaan stasioner. Apabila ini terjadi, pemupukan modal berhenti, keuntungan minimum, pendapatan per kapita menurun, produksi dan perekonomian menjadi macet. Maka dari itu dibutuhkan peran dan kebijakan pemerintah untuk melakukan belanja modal selain yang dilakukan oleh swasta (Jhingan, 2016:81).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik (Solow-Swan)

Teori Neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow dan Trevor Swan, menjelaskan ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap kesiapan faktor-faktor produksi seperti, tenaga kerja, jumlah penduduk, akumulasi modal, dan teknologi. Pandangan ini berdasarkan anggapan analisis klasik, yaitu tingkat pekerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap dialami perekonomian dan sepenuhnya digunakan sepanjang waktu (Aghion & Howitt, 2009:21). Kemajuan teknologi juga sangat menonjol bagi

pertumbuhan ekonomi serta perkembangan ekonomi akan bergantung pada penambahan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

- a. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- b. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- c. Kemajuan Teknologi.

2.2. Teori Penerimaan Pajak

Teori penerimaan pajak ini menjelaskan mengenai kaitan antara penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori penerimaan pajak yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Peacock dan Wiseman.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan Zimmerman (1978). Teori ini menjelaskan mengenai beberapa pihak yang sepakat dalam melakukan kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* pada teori ini merupakan pihak yang memberikan wewenang, sementara *agent* merupakan pihak yang dipercaya untuk

diberikan wewenang oleh *principal*. Teori agensi mengasumsikan bahwa *agent* memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan *principal*.

Pelaksanaannya muncul asimetri informasi, dikarenakan *principal* tidak memiliki cukup informasi mengenai kinerja *agent*, maka *principal* tidak pernah merasa secara pasti bagaimana usaha *agent* dalam memberikan kontribusi. Sehingga konflik kepentingan dapat terjadi antara *principal* dan *agent*, akibat adanya perbedaan kepentingan. Pada penelitian ini konflik terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak sebagai representasi dari pemerintah. Konflik terjadi dikarenakan Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari para wajib pajak sedangkan wajib pajak berupaya untuk menghindari pembayaran pajak.

Konflik keagenan dapat dikatakan cukup rendah apabila penerimaan pajak telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Konflik keagenan yang rendah akan memberikan dampak positif pada penerimaan pajak yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi.

Teori Peacock dan Wiseman

Teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha

untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori ini juga mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan berapa tingkat toleransi tersebut.

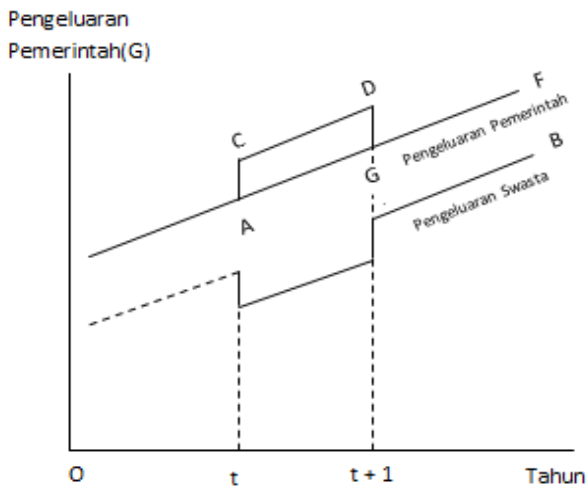
Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tetap. Pada akhirnya akan memberikan dampak pada meningkatkan penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. (Mangkoesoebroto, 2017:173)

Pada teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut

adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Terdapat banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya gangguan dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah gangguan selesai, tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadinya. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk Gambar.2.1.

Gambar 2. 1.
Teori Peacock dan Wiseman



Sumber: Mangkoesoebroto (2017:174)

Pada saat keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi gangguan maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah gangguan selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat, sehingga tingkat toleransi pajak naik dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat (Mangkoesebroto, 2017:173-175).

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi (Waluyo, 2011) menjadi tiga bagian berikut ini:

1. Sistem Official Assessment.
2. Sistem Self Assessment
3. Sistem Withholding

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku (Mardiasmo, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPH)
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

3. Bea Materai

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

2.3. Teori Belanja Modal

Teori belanja modal ini menjelaskan mengenai kaitan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori belanja modal yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Batas Kritis Clorin Clark dan Teori Mikro .

Teori Batas Kritis Clorin Clark

Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan sebesar 25 persen dari pendapatan nasional, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Teori ini juga mengatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari

total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi gangguan sosial lainnya. (Mangkoesoebroto, 2017:176)

Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penentuan Permintaan

$$U^i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. (Mangkoesebroto, 2017:177).

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyesuaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serat investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang

menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk (pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan) pembangunan serta perawatan jalan, irigasi, dan jaringan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal, kontrak sewa jual beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.4. Teori Permintaan Uang Keynes

Teori permintaan uang dari Keynes merupakan bagian dari teori makro yang dituangkan dalam bukunya *The General Theory of*

Employment, Interest and Money. Pada teori ini, John Maynard Keynes mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan teori permintaan uang klasik, yang mana menolak pernyataan bahwa perputaran uang bersifat konstan dan menekankan pentingnya tingkat suku bunga. Perbedaan lainnya pada fungsi uang yang lain yaitu sebagai tempat penyimpanan kekayaan (*store of value*), bukan hanya sebagai alat transaksi (Mishkin, 2004:521).

Keynes membagi permintaan uang atas tiga motif yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga dan untuk spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tergantung pada tingkat pendapatan yang dimiliki. Semakin besar pendapatan seseorang atau masyarakat, maka semakin besar permintaan uang untuk tujuan transaksi. Keynes juga berpendapat permintaan uang untuk berjaga-jaga tergantung pada pendapatan yang digunakan sebagai cadangan untuk sesuatu hal yang tak terduga. Semakin besar pendapatan seseorang atau masyarakat, maka semakin besar pula cadangan uang tunai untuk hal-hal yang tak terduga (Mishkin, 2004:522).

Keynes berpendapat bahwa dalam permintaan uang untuk spekulasi ini tergantung pada tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga semakin rendah permintaan uang tunai oleh seseorang atau masyarakat. Alasannya adalah semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar ongkos memegang uang tunai sehingga

seseorang atau masyarakat lebih baik membeli obligasi. Sebaliknya semakin rendah tingkat bunga maka semakin rendah ongkos memegang uang tunai dan semakin besar seseorang atau masyarakat menyimpan uang tunai.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, permintaan uang total menurut Keynes adalah sebagai berikut:

$$M_d/P = f(Y) + k(r)$$

M_d/P artinya permintaan uang total masyarakat dalam riil tergantung pada tingkat pendapatan (Y) yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga serta tergantung pada tingkat bunga (r) untuk tujuan spekulasi. Keynes menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar (M_s) akan mempengaruhi keseimbangan pasar uang ($M_s = M_d$) dan menentukan tingkat bunga yang akan mempengaruhi investasi (I) dan melalui mekanisme angka pengganda (*multiplier*) akan mempengaruhi tingkat output nasional (Yuliadi, 2008:55).

2.5. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dalam perekonomian dan infrastruktur keuangan memiliki peran yang sangat penting dan krusial. Humprey et al., (1996) mengemukakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu rancangan yang menghasilkan pasar keuangan beroperasi serta menjadi aktual selagi terjadinya pertukaran barang dan jasa menggunakan uang tunai, giro, cek, kartu debit/ATM, kartu kredit,

dan *e-money*. Maka, perniagaan menjadi lebih luas dan biaya administrasi akan menurun, hal ini akan menaikkan spesialisasi. Selain itu, transmisi arus dana baik domestik maupun internasional ke dalam investasi produktif melalui pasar finansial juga dilayani oleh sistem pembayaran.

Sistem pembayaran sendiri telah mengalami kemajuan secara terus-menerus selama beberapa kurun waktu, seiring terjadinya transformasi karakter dan pemanfaatan uang sebagai alat pembayaran untuk melakukan transaksi. Perkembangan ini ditunjukkan oleh terjadinya transformasi bentuk, yaitu dalam suatu bentuk memungkinkannya pembayaran menggunakan cek atau giral, dilakukan dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan, khususnya bank. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin modern tersebut, mulai bermunculan berbagai instrumen pembayaran non tunai (*cashless payment*) dengan beragam rupa yaitu *mobile banking*, *phone banking*, kartu ATM/debet, kartu kredit, *e-money*, *smart card*, *e-wallet*, dan seterusnya. Terdapat dua jenis sistem pembayaran, yakni:

Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran secara tunai merupakan suatu instrumen pembayaran yang memakai uang kartal yakni uang kertas dan uang logam. Namun, kegiatan transaksi memakai uang kertas lebih sering

dijumpai dalam kegiatan perekonomian. Penggunaan instrumen ini dalam bertransaksi banyak dipilih dengan pertimbangan kemudahan.

Sistem Pembayaran Non Tunai

Pembayaran non tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank berperan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Alat pembayaran non tunai terbagi menjadi dua jenis sistem, sebagai berikut:

Bank Indonesia sebagai penyelenggara, yakni:

1. Sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI)
2. *Real time gross settlement* (BI-RTGS)
3. *Scripless securities settlement system* (SSSS),

Industri sebagai penyelenggara, yakni:

1. Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK)
2. *Electronic money* atau lebih dikenal uang elektronik
3. Penyelenggaraan transfer dana bukan bank.

2.6 Pandemi Covid 19

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2

(SARS-CoV-2) virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. COVID-19 sekarang telah menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global (World Health Organization, 2020a). *World Health Organization* (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID 19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas. Pandemi COVID 19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan

Karakteristik COVID-19 Dalam buku Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi COVID 19 (2020) menyatakan, COVID 19 ini menyebabkan pneumonia ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat di nonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin). Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini (Kemenkes RI, 2020a)

BAB III

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

3.1. Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Pandemi COVID- 19

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan output dalam jangka panjang, yang mencakup tiga aspek, yaitu proses, output per kapita, dan dalam jangka panjang. Berikut data pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Hal ini digunakan untuk mengetahui dan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun (BPS, 2020).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia sebelum pandemi dilihat dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif meskipun dari tahun 2018 mengalami penurunan. Rata-rata nilai PDB ADHK sebesar Rp896.037,14miliar, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian adalah 0,4082 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 3.1, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB ADHK
Tahun 2010 Tahun 2018 – 2019 (Miliar Rupiah) Sebelum Pandemi
COVID-19

Tahun	Bulan	PDB	%	
2018	April	859.768,70	0.4179	
	Mei	863.353,80	0.4169	
	Juni	866.945,50	0.4160	
	Juli	870.543,90	0.4150	
	Agustus	874.148,80	0.4140	
	September	877.760,20	0.4130	
	Oktober	881.378,30	0.4120	
	November	885.003,00	0.4110	
	Desember	888.634,20	0.4100	
	2019	Januari	892.272	0.4090
		Februari	895.916,40	0.4080
		Maret	899.567,40	0.4070
April		903.225	0.4060	
Mei		906.889,20	0.4050	
Juni		910.559,90	0.4040	
Juli		914.237,20	0.4030	
Agustus		917.921,10	0.4029	
September		921.611,60	0.4020	
Oktober		925.308,70	0.4010	
November		929.012,40	0.4000	
Desember		932.722,60	0.3990	
Maksimum		932.722,60	0.4179	
Minimum		859.768,70	0.3990	
Rata-rata		896.037,14	0.4082	

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2018-2019,

data diolah

Melalui tabel dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 meskipun tingkat pertumbuhan sempat mengalami penurunan, namun tidak terdapat pertumbuhan yang mencapai nilai

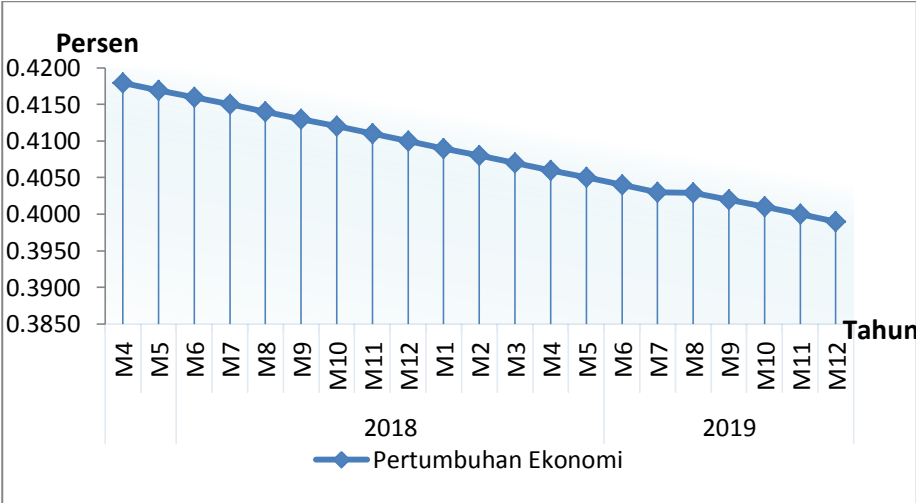
negatif. Hal ini dapat dilihat pada nilai PDB di bulan April 2018 senilai Rp 859.768,70 yang merupakan nilai terendah pada periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pada bulan selanjutnya didorong oleh berangsur membaiknya harga komoditas global dan perekonomian di negara maju. Bahkan dari sisi domestik, kinerja tersebut didukung oleh perbaikan ekspor dan peningkatan investasi, meskipun masih melambatnya konsumsi masyarakat (Bank Indonesia, 2017).

Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan sejak bulan Februari 2018 meskipun secara nominal PDB terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada bulan April 2018 sebesar 0,4179 persen. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut harga komoditas internasional meningkat, perekonomian beberapa mitra dagang Indonesia menguat, dan kondisi ekonomi global menunjukkan penguatan meskipun laju pertumbuhan lebih rendah. Selanjutnya, dari domestik belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor mengalami peningkatan yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 0,3990 persen yang terjadi pada bulan Desember 2019 meskipun periode tersebut merupakan nilai PDB tertinggi. Hal ini disebabkan oleh masih terdapatnya beberapa risiko yang perlu diwaspadai dari

perkembangan perekonomian global yang sedang dalam tren melambat. Akibatnya, realisasi pertumbuhan ekonomi jauh meleset dari target dan proyeksi pemerintah dalam APBN. Meskipun biaya meminjam lebih rendah, dan mulai terjadi perbaikan sentimen usaha sebagai hasil dari usulan reformasi ekonomi pada bulan tersebut. (Bank Indonesia, 2019). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018– 2019
Sebelum Pandemi COVID-19



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

Pertumbuhan ekonomi pada periode ini berakselerasi lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global, sebagai konsekuensinya harga komoditas mengalami penurunan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan juga pada perekonomian di Indonesia

meskipun tidak mengalami kontraksi negatif yang drastis bila dibandingkan periode pada saat terjadinya Pandemi COVID-19. Berdasarkan penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai PDB yang mewakili pertumbuhan ekonomi selama periode sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan tren peningkatan.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi Saat Pandemi COVID-19

Pada saat pandemi COVID-19 dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan rata-rata nilai PDB adalah Rp903.384,44 miliar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0031 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada awal tahun 2020 bersamaan dengan terjadinya Pandemi COVID-19. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif pada seluruh komponen PDB Pengeluaran serta kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Penurunan terjadi secara terus menerus dari bulan Januari sampai bulan Juni. Pada bulan Juli mulai mengalami peningkatan meskipun pada bulan Oktober menurun kembali, kemudian mengalami peningkatan kembali di bulan Februari 2021.

Pada bulan Februari 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tertinggi pada saat pandemi COVID-19. Pertumbuhan

ekonomi menurun drastis hingga negatif sebesar -3,3048 persen dengan nilai sebesar Rp897.990,3. miliar. Hal ini disebabkan mulai terasanya dampak pandemi pada sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi yang menyebabkan penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Selanjutnya, mulai terasa membaik dibulan berikutnya meskipun masih negatif yaitu sebesar -2.4102 persen pada bulan Maret 2020. Perkembangan ditunjukkan oleh Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB ADHK
Tahun Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19
(Miliar Rupiah)

Tahun	Bulan	PDB	%
2020	Januari	928681.6	-0.4332
	Februari	897990.3	-3.3048
	Maret	876346.3	-2.4103
	April	863749.5	-1.4374
	Mei	860200.0	-0.4109
	Juni	865697.8	0.6391
	Juli	880242.8	1.6801
	Agustus	903835.0	2.6802
	September	912569.8	0.9664
	Oktober	911294.1	-0.1398
	November	904753.9	-0.7177
	Desember	892949.1	-1.3048
2021	Januari	881952.09	-1.2315
	Februari	895223.05	1.5047
	Maret	906796.86	1.2928
	April	916673.53	1.0892
	Mei	924853.05	0.8923
	Juni	931335.42	0.7009
	Juli	936120.64	0.5138
	Agustus	939208.72	0.3299
	September	940599.64	0.1481
		Maksimum	940599.64
	Minimum	860200.00	-3.3048
	Rata-rata	903384.44	0.0031

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2020-2021,

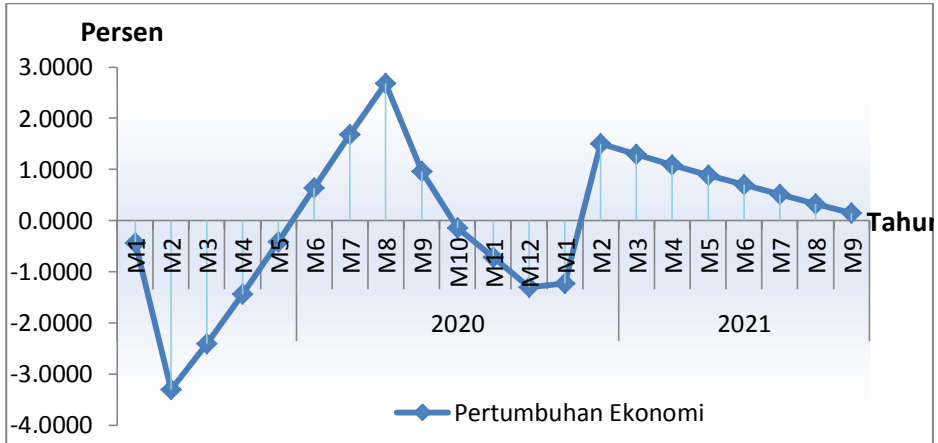
data diolah

Dampak pandemi COVID-19 mulai terasa di bulan Mei 2020, yang mana merupakan nilai PDB terendah selama periode penelitian saat adanya pandemi COVID-19. Nilai yang diperoleh sebesar Rp860.200 miliar. Nilai terendah ini dipengaruhi oleh kontraksi

ekonomi domestik yang sejalan dengan dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat oleh pemerintah. Selain itu, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat melambatnya ekonomi global akibat *lockdown* di sejumlah negara mendorong memburuknya perekonomian di Indonesia (Bank Indonesia, 2020).

Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan positif dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Agustus 2020 sebesar 2,6801 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sisi produksi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 24,28 persen yang disebabkan oleh pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian pada bulan Oktober 2020 masih mengalami penurunan negatif dengan nilai pertumbuhan sebesar -0,1379 persen, disebabkan oleh masih belum pulih seutuhnya kegiatan perekonomian dikarenakan Pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Pergerakan perkembangan pertumbuhan ekonomi saat adanya Pandemi COVID-19 dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3. 2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021
Saat Pandemi COVID-19



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian di Indonesia, meskipun sebelum pandemi mengalami pergerakan yang lambat akan tetapi nilai pertumbuhannya tidak sampai negatif.

BAB IV

PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA

4.1. Penerimaan Pajak Sebelum Pandemi COVID-19

Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, sehingga penerimaan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Data penerimaan pajak yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia.

Penerimaan pajak sebelum pandemi COVID-19, dengan periode dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. Realisasi penerimaan pajak sebelum pandemi COVID-19 mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif. Rata-rata untuk realisasi penerimaan pajak sebesar Rp128.375,58, sedangkan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,0649 persen. Peningkatan penghasilan kena pajak masyarakat dan laporan keuangan yang *closing* pada bulan April menyebabkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi pada bulan April 2018 sebesar 0,7739 persen, akan tetapi nilai realisasi penerimaan pajak di bulan tersebut merupakan terendah sepanjang periode penelitian (Kemenkeu, 2018).

Realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi di bulan Februari 2019 sebesar Rp130.223,34 miliar. Hal ini didorong oleh membaiknya kinerja Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang tumbuh 13,48% dan migas yang tumbuh 34,85%, serta jenis pajak lain yang juga mengalami pertumbuhan *double digit* seperti PPh Final dan PPh 21 (Kemenkeu, 2019). Penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018 – 2019
Sebelum Pandemi COVID-19 (Rupiah)

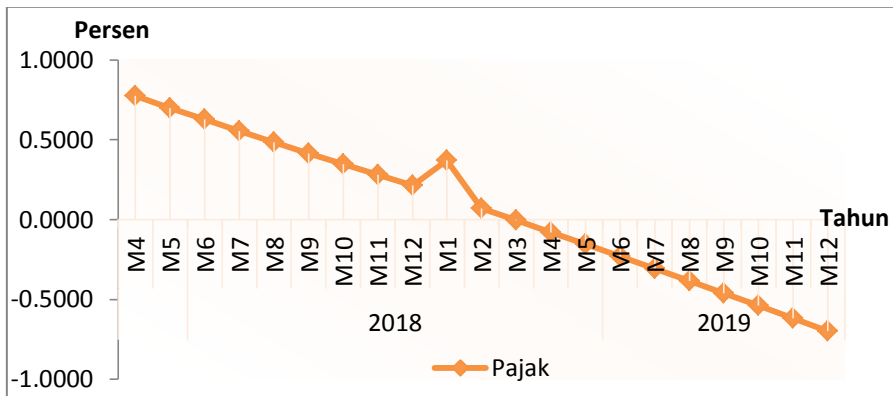
Tahun	Bulan	Pajak	%	
2018	April	125.049,54	0,7739	
	Mei	125.924,25	0,6995	
	Juni	126.713,36	0,6267	
	Juli	127.416,87	0,5552	
	Agustus	128.034,79	0,4850	
	September	128.567,12	0,4158	
	Oktober	129.013,85	0,3475	
	November	129.374,98	0,2799	
	Desember	129.650,52	0,2130	
	2019	Januari	130.131,19	0,3707
		Februari	130.223,34	0,0708
		Maret	130.217,70	-0,0043
April		130.114,27	-0,0794	
Mei		129.913,04	-0,1547	
Juni		129.614,02	-0,2302	
Juli		129.217,21	-0,3062	
Agustus		128.722,60	-0,3828	
September		128.130,20	-0,4602	
Oktober		127.440,01	-0,5387	
November		126.652,02	-0,6183	
Desember		125.76624	-0,6994	
	Maksimum	130.223,34	0,7739	
	Minimum	125.049,54	-0,6994	
	Rata-rata	128.375,58	0,0649	

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2018-2019,

data diolah

Pertumbuhan penerimaan pajak terendah terjadi pada bulan Desember 2019 sebesar -0.6994 persen. Penerimaan pajak ini tertekan disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang merembes ke dalam negeri, sehingga berimbas pada penerimaan PPN yang menurun (Kemenkeu, 2019). Adapun perkembangan penerimaan pajak digambarkan pada Gambar 4.1.

Gambar 4. 1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018 – 2019
Sebelum Pandemi COVID-19



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

4.2. Penerimaan Pajak Saat Pandemi COVID-19

Pada saat pandemi COVID-19 untuk penerimaan pajak dari bulan Januari 2020 sampai September 2021. Rata-rata penerimaan pajak adalah Rp117.820,26, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,2857 persen. Penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan meskipun sempat meningkat selama masa pandemi COVID-19.

Tercatat pertumbuhan negatif realisasi penerimaan pajaktertinggi pada awal 2020. Penurunan realisasi pajak penghasilan sektor migas sebesar 19,8 persen yoy, pajak pertambahan nilai yang minus 14,9 persen yoy, dan terakhir pajak bumi dan bangunan yang kontraksi 44,8 persen yoy. Hal ini disebabkan oleh gangguan perekonomian global, padahal periode tersebut pembatasan sosial belum masif diterapkan di Indonesia. Penurunan nilai realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi di bulan Oktober 2020 sebesar Rp115.825,09miliar, sejalan dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota besar di Indonesia serta hampir semua sektor yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 (Kemenkeu, 2020). Hal ini dapat ditunjukkan oleh Tabel 4.2.

Tabel 4. 2
Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2021
Saat Pandemi COVID-19 (Rupiah)

Tahun	Bulan	Pajak	%
2020	Januari	119.946,28	-4,6276
	Februari	119.067,84	-0,7324
	Maret	118.294,53	-0,6495
	April	117.626,36	-0,5648
	Mei	117.063,32	-0,4787
	Juni	116.605,40	-0,3912
	Juli	116.252,63	-0,3025
	Agustus	116.004,98	-0,2130
	September	115.862,47	-0,1229
	Oktober	115.825,09	-0,0323
	November	115.892,83	0,0585
	Desember	116.065,72	0,1492
2021	Januari	116.343,73	0,2395
	Februari	116.726,88	0,3293
	Maret	117.215,16	0,4183
	April	117.808,57	0,5063
	Mei	118.507,11	0,5929
	Juni	119.310,79	0,6782
	Juli	120.219,59	0,7617
	Agustus	121.233,53	0,8434
	September	122.352,61	0,9231
	Maksimum	122.352,61	0,9231
	Minimum	115.825,09	-4,6276
	Rata-rata	117.820,26	-0,2857

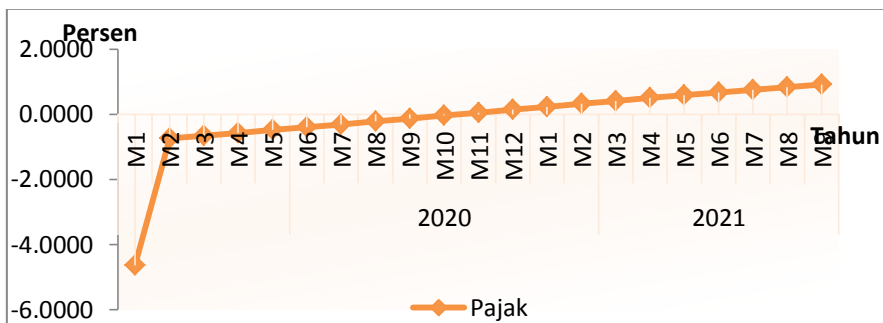
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2020-

2021, data diolah

Performa penerimaan pajak perlahan mulai membaik didorong oleh pemberian insentif dan membaiknya setoran pajak dari sektor industri dan perdagangan yang disebabkan oleh mulai

membaiiknya permintaan global dan domestik yang akan mendorong produksi, konsumsi, ekspor, dan impor meningkat. Pertumbuhan dan nilai realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi pada bulan September 2021 sebesar 0,9231 persen, dengan nilai sebesar Rp122.352,61 miliar. Perkembangan pertumbuhan penerimaan pajak secara lengkap dapat dilihat dalam Gambar 4.2.

Gambar 4. 2
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Indonesia
Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif pada penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pandemi yang menyebabkan perlambatan perekonomian domestik maupun global dan transaksi perdagangan internasional.

Pada jangka pendek, penerimaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tidak signifikan pada lag nol. Penerimaan pajak signifikan pada lag pertama dan ketujuh.

Penerimaan pajak pada jangka panjang menunjukkan dampak yang positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis, teori, dan penelitian terdahulu.

Sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), apabila penerimaan pajak telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya akan menyebabkan konflik keagenan menjadi rendah. Rendahnya konflik keagenan ini menyebabkan penerimaan pajak akan memberikan dampak positif dengan mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi. Teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak meningkat, begitu juga dengan pengeluaran meningkat. Sehingga dapat memacu perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumaryani (2019), Saragih (2018); Nurlina dan Zurjani (2018); Yunita dan Sentosa (2018); Gebreegziabher (2018); Stoilova (2017) bahwa penerimaan pajak memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, jika digunakan untuk merealisasikan program dan kegiatan yang produktif yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan sosial. Sehingga sesuai dengan hasil penelitian bahwa penerimaan pajak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB V

PERKEMBANGAN BELANJA MODAL

5.1. Belanja Modal Sebelum Pandemi COVID -19

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud. Hal ini dapat menaikkan tingkat konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal sebelum pandemi COVID-19 di Indonesia dari bulan April 2018 sampai bulan Desember 2019. Rata-rata realisasi belanja modal sebesar Rp4.209,63 Miliar, sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja modal adalah 0,0265 persen. Perkembangan transaksi belanja modal sebelum pandemi COVID-19 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Realisasi belanja modal di sepanjang periode penelitian untuk sebelum pandemi mengalami pertumbuhan negatif, dengan penurunan realisasi belanja modal tertinggi yaitu sebesar -1,6710 persen pada bulan April 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan sebesar 39,78% untuk belanja bantuan sosial (bansos), sehingga belanja modal merupakan realisasi yang

terendah apabila dibandingkan dengan belanja pemerintah lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.1. yang menampilkan data perkembangan belanja modal sebelum pandemi COVID-19.

Tabel 5. 1
Realisasi Belanja Modal Indonesia Tahun 2018– 2019
Sebelum Pandemi COVID-19 (Miliar Rupiah)

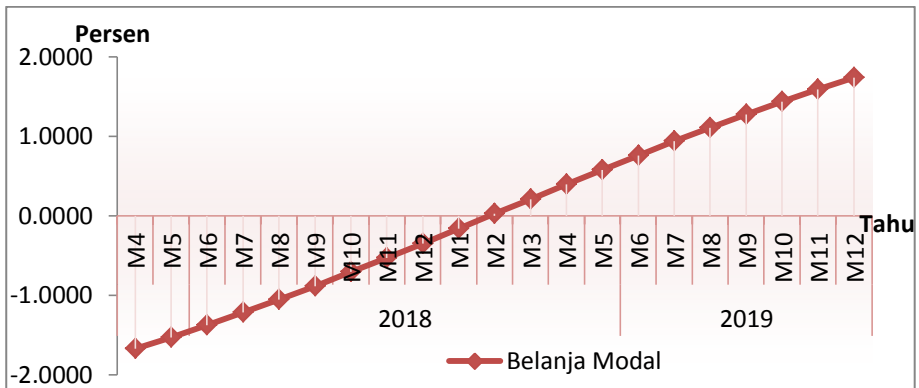
Tahun	Bulan	Belanja Modal	%
2018	April	4.402,28	-1.6710
	Mei	4.335,04	-1.5273
	Juni	4.275,38	-1.3763
	Juli	4.223,29	-1.2183
	Agustus	4.178,77	-1.0540
	September	4.141,84	-0.8840
	Oktober	4.112,47	-0.7090
	November	4.090,68	-0.5298
	Desember	4.076,47	-0.3475
	2019	Januari	4.069,83
Februari		4.070,76	0.0230
Maret		4.079,27	0.2090
April		4.095,36	0.3943
Mei		4.119,02	0.5777
Juni		4.150,25	0.7583
Juli		4.189,06	0.9351
Agustus		4.235,44	1.1073
September		4289,40	1.2740
Oktober		4.350,93	1.4345
November		4.420,04	1.5883
Desember		4.496,73	1.7349
	Maksimum	4.496,73	1.7349
	Minimum	4.069,83	-1.6710
	Rata-rata	4.209,63	0.0265

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2018-2019,

data diolah

Pada bulan Januari 2019 merupakan nilai realisasi belanja modal terendah sebesar Rp4.069,83 miliar. Hal ini disebabkan oleh pagu yang ditetapkan untuk tahun 2019 rendah, meskipun belanja modal direalisasikan semuanya. Penerimaan pajak mengalami peningkatan seiring lebih banyaknya. Tercatat pada bulan Desember 2019 merupakan nominal dan pertumbuhan transaksi kartu kredit tertinggi yaitu sebesar Rp4.496,73, dengan pertumbuhan 1,7349 persen. (Kemenkeu, 2019). Secara lebih lengkap perkembangan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak sebelum pandemi COVID-19 disajikan pada Gambar 5.1.

Gambar 5. 1
Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal Indonesia
Tahun 2018 – 2019 Sebelum Pandemi COVID-19



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

5.2. Belanja Modal Saat Pandemi COVID-19

Periode realisasi belanja modal untuk saat pandemi COVID-19 adalah bulan Januari 2020 sampai Desember 2021. Selanjutnya, rata-rata nilai realisasi belanja modal sebesar Rp5.401,20 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,3044 persen. Pada saat awal terjadinya pandemi COVID-19 mengalami peningkatan secara nominal meskipun untuk pertumbuhan mengalami fluktuatif yang tidak mencapai tingkat pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan realisasi belanja modal tertinggi sepanjang periode penelitian pada bulan Januari 2020 sebesar 8.061 persen, akan tetapi nilai realisasinya terendah sebesar Rp4.859,21 miliar. Hal ini dikarenakan realisasi belanja modal yang terus meningkat setiap bulan dan upaya pemerintah ditengah pandemi untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui anggaran belanja. Data perkembangan realisasi belanja modal dapat dilihat pada Tabel 5.2, sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Realisasi Belanja Modal Indonesia Tahun 2020-2021
Saat Pandemi COVID-19 (Miliar Rupiah)

Tahun	Bulan	Belanja Modal	%
2020	Januari	4859.21	8.0610
	Februari	4939.36	1.6496
	Maret	5015.42	1.5399
	April	5087.39	1.4348
	Mei	5155.25	1.3339
	Juni	5219.01	1.2369
	Juli	5278.67	1.1432
	Agustus	5334.24	1.0526
	September	5385.71	0.9648
	Oktober	5433.07	0.8795
	November	5476.34	0.7964
	Desember	5515.51	0.7153
2021	Januari	5550.58	0.6359
	Februari	5581.56	0.5580
	Maret	5608.43	0.4815
	April	5631.20	0.4061
	Mei	5649.88	0.3316
	Juni	5664.45	0.2580
	Juli	5674.93	0.1850
	Agustus	5681.31	0.1124
	September	5683.59	0.0401
	Maksimum	5683.59	8.0610
	Minimum	4859.21	0.0401
	Rata-rata	5401.20	1.3044

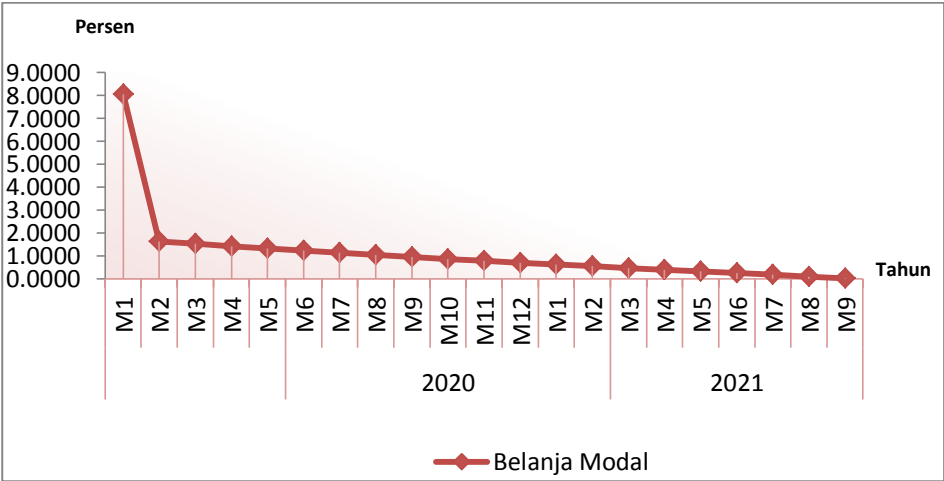
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2020-

2021, data diolah

Nominal realisasi belanja modal tertinggi pada bulan September 2021 yaitu Rp5.683,59 miliar, dengan pertumbuhan terendah sebesar 0,0401 persen. Rendahnya pertumbuhan realisasi

belanja modal disebabkan oleh anggaran yang difokuskan pada kesehatan untuk perawatan, pengadaan vaksin hingga insentif tenaga kesehatan, serta anggaran untuk belanja bantuan sosial. Dengan demikian tingkat pertumbuhan rendah meskipun nominal realisasi tertinggi sepanjang periode penelitian saat pandemi COVID-19. Adapun grafik perkembangan realisasi belanja modal dapat dilihat secara lengkap pada Gambar 5.2..

Gambar 5. 2
Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal Indonesia
Tahun 2020-2021 Saat Pandemi COVID-19



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Statistik Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

Berdasarkan perkembangan realisasi belanja modal sebelum dan saat Pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa nominal realisasi belanja modal terus mengalami peningkatan baik sebelum dan saat pandemi meskipun saat pandemi mengalami penurunan

pertumbuhan. Penurunan yang terjadi juga disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah serta anggaran yang lebih difokuskan pada kesehatan dan bantuan sosial.

Belanja modal pada jangka pendek dan jangka panjang berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan belanja modal yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana masyarakat serta infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hasil penelitian ini didukung oleh teori dan penelitian terdahulu.

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith mengemukakan bahwa dibutuhkan peran dan kebijakan pemerintah untuk melakukan belanja modal selain yang dilakukan swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik juga berpendapat bahwa pertumbuhan serta perkembangan ekonomi akan bergantung salah satunya pada akumulasi modal yang dimiliki. Sejalan juga dengan teori dorongan kuat yang mengemukakan bahwa untuk mendorong ekonomi kearah kemajuan dibutuhkan dorongan kuat dalam bentuk pemupukan modal.

Penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian ini dilakukan oleh Waryanto (2020); Pambudy (2019); Saragih (2018); Triastuti dan Pratomo (2016) bahwa belanja modal memiliki dampak

yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi belanja modal yang terealisasi, maka aktivitas ekonomi masyarakat meningkat sehingga semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Oleh karena itu, belanja modal memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Penerimaan pajak dan belanja modal sebagai kebijakan fiskal memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga cukup berdampak positif untuk membantu mengatasi dampak negatif selama terjadinya pandemi COVID-19. Pada periode sebelum pandemi COVID-19, penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Hal ini menunjukkan masih kurang tepatnya kebijakan dalam pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi pada sebelum pandemi COVID-19. Pengaruhnya tidak dapat dirasakan secara langsung karena panjangnya alur transmisi dalam prosesnya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pendeknya waktu penelitian.

Pada saat pandemi COVID-19, penerimaan pajak dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Kebijakan pajak bahkan dinilai dapat memainkan peran penting sebagai pengendali dampak ekonomi akibat pandemi seperti penelitian yang dilakukan oleh Craig dan Hines (2020). Percepatan realisasi stimulus oleh pemerintah dari anggaran negara diarahkan sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi (Wuryandani, 2020).

Kebijakan pajak selama pandemi juga dinilai kecil kemungkinan untuk mengatasi masalah negara secara komprehensif dan berkelanjutan. Belanja modal pun tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dikarenakan distribusi stimulus pajak dan permodalan yang nyatanya belum tepat sasaran (Wuryandani, 2020) dan realokasinya anggaran belanja modal untuk fokus kepada belanja penanganan pandemi, bantuan sosial, dan insentif untuk membantu mengatasi dampak pandemi COVID-19, serta penerimaan pajak yang menurun meskipun telah diberikan insentif pajak. Oleh karena itu, dampak penerimaan pajak dan belanja modal belum cukup signifikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi selama pandemi di Indonesia walaupun memberikan dampak positif

BAB VI

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN KARTU DEBIT

6.1. Transaksi Kartu Debit Sebelum Pandemi COVID-19

Kartu debit merupakan salah satu APMK yang digunakan untuk melakukan volume pembelanjaan, transfer dana antar bank, transaksi penarikan tunai, dan transfer dana interbank melalui kartu debit. Peningkatan perkembangan pembayaran non tunai akan mengganti perlahan uang tunai dan mempercepat perputaran uang, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Data Transaksi Kartu Debit yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia, dengan melihat total transaksi dari kartu debit dari April 2018 – September 2021.

Transaksi kartu debit sebelum pandemi COVID-19, dengan periode dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. Transaksi kartu debit sebelum pandemi COVID-19 mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif. Rata-rata untuk transaksi kartu debit adalah Rp611.112.671,29, sedangkan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,26 persen.

Perkembangan transaksi kartu debit di tahun 2019 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Pada bulan Januari dan Februari 2019 mengalami pertumbuhan negatif dengan nilai sebesar

-8,46 persen dan -6,99 persen. Penyebab menurunnya adalah beralihnya transaksi dari kartu debit ke *e-money* dan menjadi salah satu penyebab terbesar penurunan jumlah transaksi kartu debit. Selain itu, terdapat faktor *fraud*, yang menyebabkan pembatasan transaksi kartu debit sehingga sangat mempengaruhi volume transaksi. Dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6. 1
Transaksi Kartu Debit Indonesia Tahun 2018 – 2019 Sebelum
Pandemi COVID-19 (Rupiah)

Tahun	Bulan	Transaksi Kartu Debit	%	
2018	April	549.569.983,89	-2,40	
	Mei	600.905.264,97	9,34	
	Juni	574.783.452,68	-4,35	
	Juli	595.466.696,86	3,60	
	Agustus	594.821.328,51	-0,11	
	September	569.859.728,48	-4,20	
	Oktober	601.908.413,94	5,62	
	November	592.730.941,95	-1,52	
	Desember	678.496.469,49	14,47	
	2019	Januari	621.082444,23	-8,46
		Februari	577.656.707,21	-6,99
		Maret	619.179.344,48	7,19
April		613.167.354,95	-0,97	
Mei		730.938.608,05	19,21	
Juni		543.844.993,83	-25,60	
Juli		674.511.097,00	24,03	
Agustus		619.441.558,55	-8,16	
September		594.507.262,89	-4,03	
Oktober		620.972.243,95	4,45	
November		606.203.488,41	-2,38	
Desember		653.318.712,69	7,77	
	Maksimum	730.938.608,05	24,03	
	Minimum	543.844.993,83	-25,60	
	Rata-rata	611.112.671,29	1,26	

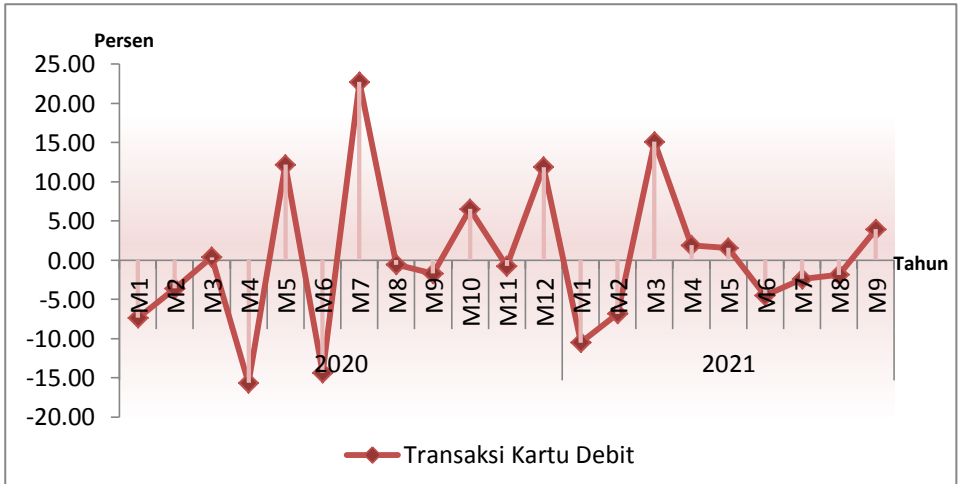
Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

Nilai transaksi kartu debit tertinggi pada bulan Mei 2019 sebesar Rp730.938,608,05. Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan transaksi interkoneksi antarjaringan atau *off-us* dari kartu debit

berlogo gerbang pembayaran nasional (GPN) menyebabkan distribusi kartu terus melaju, sehingga mendorong kenaikan total transaksi menggunakan kartu debit. Pasalnya, bertransaksi akan lebih efisien dikarenakan seluruh pembayaran antar bank akan menjadi satu dan saling terhubung (Bank Indonesia, 2019). Selain itu pada periode Mei 2019 nilai transaksi juga dipengaruhi oleh momen Ramadhan 2019 yaitu THR yang diterima pekerja.

Pertumbuhan transaksi kartu debit terendah terjadi di bulan Juni 2019 yaitu sebesar -25,60 persen, dengan nominal transaksi kartu debit sebesar Rp543.844.993,83 dan pertumbuhan tertinggi pada bulan Juli 2019 sebesar 24,03 persen. Menurut BI, penyebab naik dan turun dikarenakan terdapat kebijakan masing-masing lembaga penerbit yaitu meningkatkan penerbitan kartu debit berlogo GPN yang bekerja sama dengan MasterCard dan menghapus kepemilikan kartu dari pengguna yang sudah tidak aktif. Adapun perkembangan transaksi kartu debit digambarkan pada Gambar 6.1 sebagai berikut:

Gambar 6. 1
Pertumbuhan Transaksi Kartu Debit Indonesia Tahun 2018 –
2019 Sebelum Pandemi COVID-19



Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

6.2. Transaksi Kartu Debit Saat Pandemi COVID-19

Periode penelitian saat adanya COVID-19 untuk transaksi kartu debit dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021. Rata-rata transaksi kartu debit adalah Rp598.821.525,17, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,30 persen. Transaksi kartu debit mengalami penurunan signifikan meskipun sempat meningkat selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Tabel 6.2.

Tabel 6. 2
Transaksi Kartu Debit Indonesia Tahun 2020-2021 Saat Adanya
Pandemi COVID-19 (Rupiah)

Tahun	Bulan	Transaksi Kartu Debit	%
2020	Januari	605.499.506,32	-7,32
	Februari	583.732.753,27	-3,59
	Maret	586.043.486,05	0,40
	April	494.528.400,39	-15,62
	Mei	554.747.199,85	12,18
	Juni	475150.286,24	-14,35
	Juli	583.121.123,10	22,72
	Agustus	579.779.335,19	-0,57
	September	569.952.438,83	-1,69
	Oktober	607.251.334,62	6,54
	November	602.759.041,51	-0,74
	Desember	674.310.323,67	11,87
2021	Januari	603.529.767,47	-10,50
	Februari	562.352.679,86	-6,82
	Maret	647.234.209,01	15,09
	April	659.566.524,85	1,91
	Mei	669.967.725,95	1,58
	Juni	640.040.874,14	-4,47
	Juli	624.895.410,14	-2,37
	Agustus	613.273.283,84	-1,86
	September	637.516.324,29	3,95
	Maksimum	674.310.323,67	22,72
	Minimum	475.150.286,24	-15,62
	Rata-rata	598.821.525,17	0,30

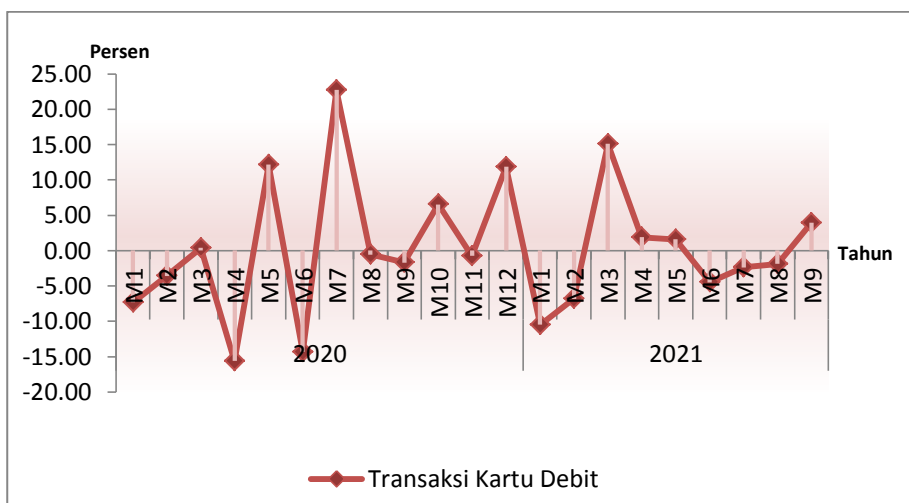
Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

Tercatat pertumbuhan negatif transaksi kartu debit pada awal 2020. Penurunan negatif transaksi kartu debit ini sebesar -7,32 persen yang disebabkan oleh gangguan perekonomian global, padahal periode tersebut pembatasan sosial belum masif diterapkan

di Indonesia. Penurunan pertumbuhan tertinggi terjadi di bulan April 2020 sebesar -15,62 persen, sejalan dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota besar di Indonesia. Mobilitas masyarakat menjadi terhambat, terutama aktivitas belanja dan bertransaksi (Bank Indonesia, 2020a).

Performa transaksi kartu kredit perlahan akan mulai membaik didorong oleh pemberian bantuan oleh pemerintah melalui kartu debit, program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) (Bank Indonesia, 2020a). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2020 sebesar 22,72 persen. Perkembangan transaksi kartu kredit secara lengkap dapat dilihat dalam Gambar 6.2 sebagai berikut:

Gambar 6. 2
Pertumbuhan Transaksi Kartu Debit Indonesia Tahun 2020-2021
Saat Pandemi COVID-19



Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

BAB VII

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT

7.1. Transaksi Kartu Kredit Sebelum Pandemi COVID-19

Kartu Kredit dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk volume pembelanjaan, transaksi penarikan tunai, transfer dana antarbank, serta transfer dana interbank melalui kartu kredit. Kewajiban pembayaran ditanggung terlebih dahulu oleh penerbit.

Berdasarkan data perkembangan transaksi kartu kredit sebelum pandemi COVID-19 di Indonesia dari bulan April 2018 sampai bulan Desember 2019, dapat dilihat bahwa rata-rata transaksi menggunakan kartu kredit sebesar Rp27.790.677,65. Rata-rata pertumbuhan transaksi kartu kredit adalah 1,54 persen. Perkembangan transaksi kartu kredit sebelum pandemi COVID-19 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Transaksi kartu kredit di awal tahun mengalami pertumbuhan yang menurun drastis, penurunan penggunaan kartu kredit untuk transaksi belanja yang menjadi penyebab utama. Pada bulan September 2018 merupakan pertumbuhan transaksi kartu kredit terendah yaitu sebesar Rp24.382.543,89, dengan pertumbuhan -6,84 persen. Hal ini dapat

dilihat pada tabel 7.1. yang menampilkan data perkembangan transaksi kartu kredit sebelum pandemi COVID-19.

Tabel 7. 1
Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2018– 2019 Sebelum Pandemi COVID-19 (Rupiah)

Tahun	Bulan	Transaksi Kartu Kredit	%	
2018	April	25.674.094,01	0,48	
	Mei	27.036.978,71	5,31	
	Juni	25.402.397,65	-6,05	
	Juli	26.737.770,59	5,26	
	Agustus	26.172.037,22	-2,12	
	September	24.382.543,89	-6,84	
	Oktober	28.035.289,33	14,98	
	November	27.250.855,66	-2,80	
	Desember	30.229.435,52	10,93	
	2019	Januari	28.023.385,25	-7,30
		Februari	25.815.999,53	-7,88
		Maret	28.090.127,28	8,81
April		27.784.966,14	-1,09	
Mei		30.452.858,60	9,60	
Juni		25.907.896,27	-14,92	
Juli		29.863.517,06	15,27	
Agustus		28.240.867,90	-5,43	
September		27.671.673,42	-2,02	
Oktober		29.301.344,89	5,89	
November		28.699.849,87	-2,05	
Desember		32.830.341,80	14,39	
	Maksimum	32.830.341,80	15,27	
	Minimum	24.382.543,89	-14,92	
	Rata-rata	27.790.677,65	1,54	

Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

Pada periode tersebut, total transaksi kartu kredit untuk belanja mengalami penurunan disebabkan oleh adanya kehadiran

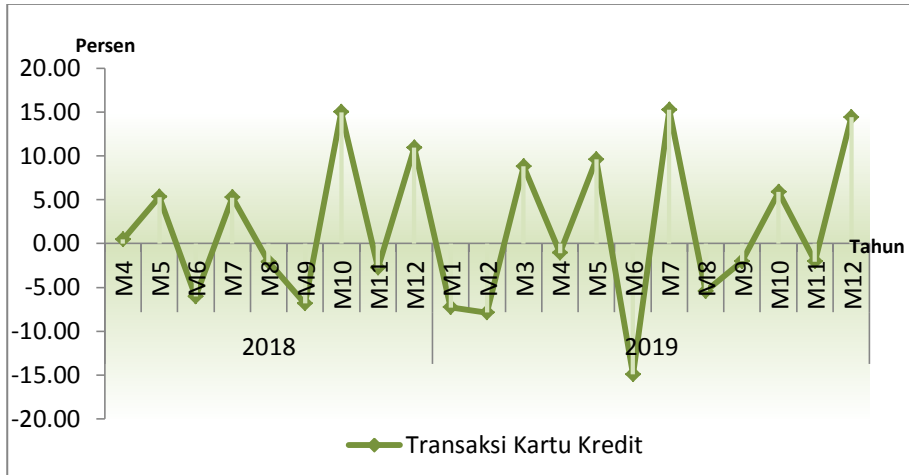
instrumen baru seperti *fintech* dan pelaporan data nasabah dari bank ke ditjen pajak yang memunculkan spekulasi di masyarakat sehingga mempengaruhi transaksi kartu kredit. Terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir juga memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan sektor plesiran merupakan salah satu andalan dalam bisnis kartu kredit.

Transaksi kartu kredit mengalami perlambatan seiring lebih banyaknya pilihan untuk melakukan transaksi pembayaran non tunai. Pertumbuhan terendah pada tahun 2019 terjadi di bulan Juni dengan pertumbuhan sebesar -14,92 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pilihan untuk melakukan transaksi pembayaran non tunai. Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat selama Idul Fitri, sehingga meningkatkan penggunaan kartu kredit menyebabkan Juli 2019 merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2019 sebesar 15,27 persen.

Nominal transaksi kartu kredit tertinggi sepanjang periode penelitian terjadi pada Desember 2019 sebesar Rp32.830.341,80. Hal ini disebabkan oleh perbankan yang mendorong jumlah akuisisi kartu kredit dan transaksi yang berkaitan dengan gaya hidup masyarakat. Peningkatan dan penurunan transaksi kartu kredit sampai akhir tahun disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dari lembaga penerbit dan bank sentral (Bank Indonesia, 2019).

Secara lebih lengkap perkembangan transaksi kartu kredit sebelum pandemi COVID-19 disajikan pada Gambar 7.1.

Gambar 7. 1
Pertumbuhan Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2018 – 2019
Sebelum Pandemi COVID-19



Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

7.2. Transaksi Kartu Kredit Saat Pandemi COVID-19

Periode transaksi kartu kredit untuk saat adanya pandemi COVID-19 adalah bulan Januari 2020 sampai September 2021. Selanjutnya, rata-rata nilai transaksi sebesar Rp19.647.395,35 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,40 persen. Pada saat awal terjadinya pandemi COVID-19 mengalami penurunan secara signifikan dan terus menurun bahkan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -12,91 persen pada bulan Januari 2020. Meskipun periode tersebut merupakan nominal transaksi kartu kredit tertinggi

saat adanya pandemic COVID-19 sebesar Rp28.590.793,02. Penyebab pertumbuhan negatif transaksi kartu kredit adalah rendahnya daya beli masyarakat serta transaksi dengan nominal yang besar berada pada segmen *traveling* dan pariwisata yang terdampak sangat signifikan baik secara global maupun domestik. Data perkembangan transaksi kartu kredit dapat dilihat pada Tabel 7.2, sebagai berikut:

Tabel 7. 2
Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2020-2021
Saat Pandemi COVID-19 (Rupiah)

Tahun	Bulan	Transaksi Kartu Kredit	%
2020	Januari	28.590.793,02	-12,91
	Februari	25.869.956,28	-9,52
	Maret	24.158.165,72	-6,62
	April	15.962.613,47	-33,92
	Mei	15.088.735,84	-5,47
	Juni	17.101.803,92	13,34
	Juli	18.070.359,30	5,66
	Agustus	18.236.805,36	0,92
	September	17.527.238,91	-3,89
	Oktober	17.212.000,80	-1,80
	November	19.893.394,77	15,58
	Desember	21.191.741,20	6,53
2021	Januari	18.219.770,34	-14,02
	Februari	17.197.725,58	-5,61
	Maret	21.434.978,52	24,64
	April	20.028.523,33	-6,56
	Mei	19.706.987,58	-1,61
	Juni	19.811.448,45	0,53
	Juli	17.124.440,96	-13,56
	Agustus	19.699.172,93	15,04
	September	20.468.645,99	3,91
Maksimum	28.590.793,02	24,64	
Minimum	15.088.735,84	-33,92	
Rata-rata	19.647.395,35	-1,40	

Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

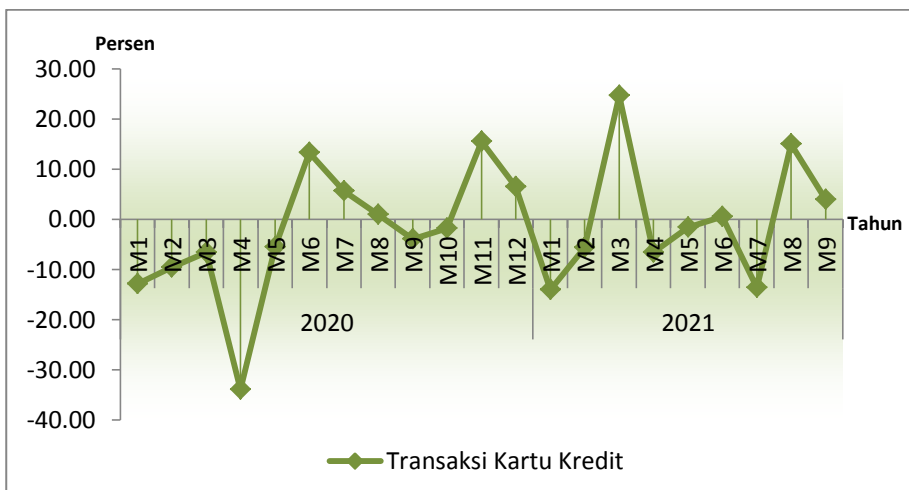
Nominal transaksi dan pertumbuhan transaksi kartu kredit terendah selama periode penelitian pada bulan April 2020 sebesar Rp15.088.735,84 dengan pertumbuhan -33,92 persen. Hal ini disebabkan oleh fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Mulai berlakunya PSBB serta tersendatnya pembayaran cicilan kartu kredit juga sangat berpengaruh (Bank Indonesia, 2020a). Dengan demikian, menghambat transaksi menggunakan kartu kredit.

Pada bulan Maret 2021, mengalami pertumbuhan positif menjadi 24,64 persen dengan nilai transaksi sebesar Rp21.434.978,52. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi selama periode penelitian. Transaksi penggunaan kartu kredit mulai mengalami peningkatan sebagai akibat dari Bank Indonesia yang melonggarkan kebijakan kartu kredit dan pemberian relaksasi oleh perbankan kepada masyarakat untuk menjaga arus kas dan meredam dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di sektor perbankan, serta meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya pembayaran digital dan terjadinya akselerasi *digital banking*. Namun transaksi mengalami penurunan hingga pertumbuhan negatif kembali pada

bulan April dan Mei 2020 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang disebabkan oleh kelesuan ekonomi yang terjadi.

Berdasarkan perkembangan penggunaan transaksi kartu kredit sebelum dan saat adanya Pandemi COVID-19. Dapat disimpulkan penggunaan kartu kredit sebelum pandemi meskipun fluktuatif akan tetapi menunjukkan tren kenaikan. Penurunan yang terjadi juga disebabkan oleh kebijakan dari lembaga penerbit dan bank sentral. Transaksi kartu kredit saat adanya pandemi COVID-19, menunjukkan tren penurunan meskipun sempat mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat menurun signifikan dan kehati-hatian perbankan. Adapun perkembangan transaksi kartu kredit dapat dilihat secara lengkap pada Gambar 7.2

Gambar 7. 2
Pertumbuhan Transaksi Kartu Kredit Indonesia Tahun 2020-2021
Saat Adanya Pandemi COVID-19



Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

BAB VIII

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN *E-Money*

8.1. Transaksi *E-Money* Sebelum Pandemi COVID-19

E-Money menjadi salah satu alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet dan nilai yang disetor dikelola oleh penerbit untuk melakukan transaksi ataupun transfer dana bukan untuk tabungan. Data Transaksi *E-Money* dalam penelitian ini menggunakan total transaksi dari *E-Money* per bulan dari April 2018 – September 2021.

. Nilai rata-rata Transaksi *E-Money* sebesar Rp8.669.183,97 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,61 persen. Penggunaan *E-Money* untuk bertransaksi mengalami fluktuasi.

Nominal transaksi terendah dari *e-money* terjadi pada bulan April 2018, sebesar Rp3.352.893,65. Hal ini dikarenakan dana yang dihimpun dalam bertransaksi tidak besar. Pertumbuhan transaksi kartu kredit terendah terjadi pada bulan September 2018 sebesar -9,79 persen.

Transaksi *e-money* cenderung menurun pada paruh utama tahun 2019, pertumbuhan negatif terjadi di Januari sebesar -1,17 persen. Selanjutnya menunjukkan perbaikan yang mana Maret

merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun, sebesar 50,03 persen. Peningkatan ini disebabkan pemberian berbagai program promosi yang menarik dari lembaga penerbit untuk meningkatkan transaksi non tunai di berbagai *merchant*. Berdasarkan penyajian data transaksi *E-Money* periode April 2018 sampai dengan Desember 2019 pada Tabel 8.1

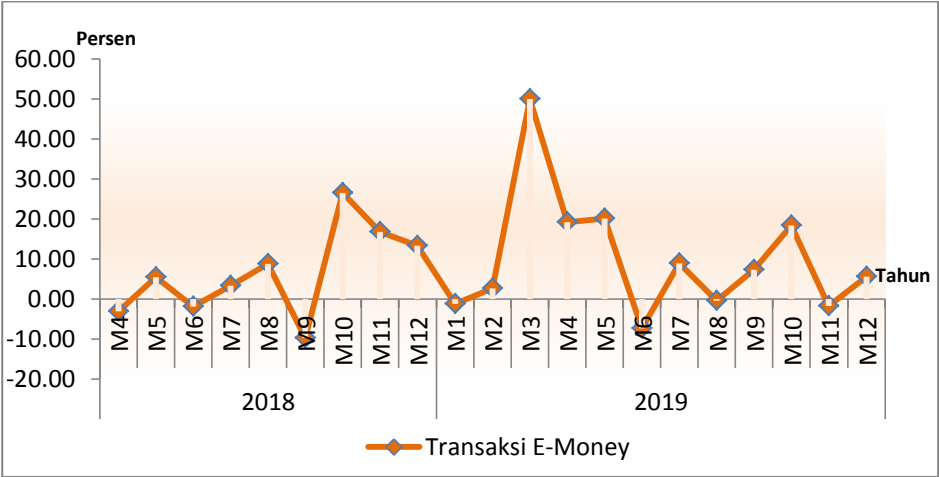
Tabel 8. 1
Transaksi *E-Money* Indonesia Tahun 2018 - 2019 Sebelum Pandemi COVID-19 (Rupiah)

Tahun	Bulan	Transaksi <i>E-Money</i>	%	
2018	April	3.352.893,65	-3,06	
	Mei	3.534.568,85	5,42	
	Juni	3.469.726,77	-1,83	
	Juli	3.582.677,10	3,26	
	Agustus	3.899.473,95	8,84	
	September	3.517.834,76	-9,79	
	Oktober	4.448.574,06	26,46	
	November	5.195.495,09	16,79	
	Desember	5.886.151,58	13,29	
	2019	Januari	5.817.363,19	-1,17
		Februari	5.970.261,90	2,63
		Maret	8.956.977,62	50,03
April		10.671.171,33	19,14	
Mei		12.815.686,14	20,10	
Juni		11.874.500,19	-7,34	
Juli		12.939.442,66	8,97	
Agustus		12.878.102,65	-0,47	
September		13.820.413,33	7,32	
Oktober		16.370.714,85	18,45	
November		16.080.700,90	-1,77	
Desember		16970.132,84	5,53	
	Maksimum	16.970.132,84	50,03	
	Minimum	3.352.893,65	-9,79	
	Rata-rata	8.669.183,97	8,61	

Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

Transaksi *e-money* tertinggi adalah Rp16.970.132,84 yang terjadi pada periode Desember 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat terhadap uang digital terus menguat. Penguatan transaksi *e-money* disebabkan oleh kebijakan Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi pembayaran untuk pemulihan ekonomi nasional, seperti penyaluran bantuan sosial, transaksi keuangan pemerintah daerah dan integrasi moda transportasi (Bank Indonesia, 2019). Pergerakan perkembangan transaksi *e-money* dapat dilihat pada Gambar 8.1

Gambar 8. 1
Pertumbuhan Transaksi *E-Money* Indonesia Tahun 2018 - 2019
Sebelum Pandemi COVID-19



Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2018-2019, data diolah

8.2. Transaksi *E-Money* Saat Pandemi COVID-19

Tercatat saat adanya pandemi dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021, nilai transaksi *e-money* terendah 14.955.261 pada Juni 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -14,35 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan terendah selama adanya pandemi. Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada April 2020 sebesar 16,73 persen dengan nilai transaksi yaitu Rp17.552.119,31 dan nilai transaksi *e-money* tertinggi terjadi pada bulan September 2021 sebesar Rp27.637.429,79 dengan pertumbuhan sebesar 11,65 persen. Nilai rata-rata transaksi *e-money* sebesar Rp19.748.382,97 dan rata-rata pertumbuhan adalah 2,64 persen. Perkembangan transaksi *e-money* dapat dilihat pada tabel 8.2

Tabel 8. 2
Transaksi *E-Money* Indonesia Tahun 2020-2021
Saat Pandemi COVID-19 (Rupiah)

Tahun	Bulan	Transaksi <i>E-Money</i>	%
2020	Januari	15.872.433,34	-6,47
	Februari	15.178.625,21	-4,37
	Maret	15.036.069,58	-0,94
	April	17.552.119,31	16,73
	Mei	15.033.707,95	-14,35
	Juni	14.955.261,01	-0,52
	Juli	16.099.555,91	7,65
	Agustus	17.230.546,81	7,02
	September	17.681.855,76	2,62
	Oktober	18.793.006,08	6,28
	November	19.340.829,53	2,92
	Desember	22.135.159,53	14,45
2021	Januari	20.746.479,38	-6,27
	Februari	19.189.083,10	-7,51
	Maret	21.420.774,89	11,63
	April	22.848.143,59	6,66
	Mei	23.659.837,71	3,55
	Juni	24.160.774,80	2,12
	Juli	25.390.247,20	5,09
	Agustus	24.754.101,87	-2,51
	September	27.637.429,79	11,65
Maksimum	27.637.429,79	16,73	
Minimum	14.955.261,01	-14,35	
Rata-rata	19.748.382,97	2,64	

Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

Pada saat awal terjadi pandemi COVID-19 transaksi *E-Money* mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini dapat disebabkan akibat dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan *Work From Home* (WFH). Penerapan PBB dan WFH, berdampak pada menurunnya mobilitas masyarakat. Transaksi *e-money* mengalami pertumbuhan tertinggi pada bulan April 2020

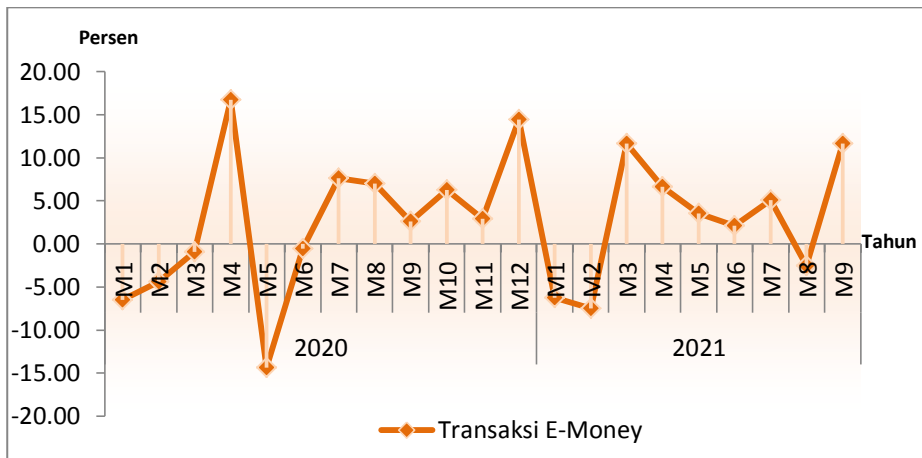
sebesar 16,73 persen. Hal ini akibat oleh peningkatan transaksi di *e-commerce* dan kebijakan Bank Indonesia guna mendorong optimalisasi penggunaan non tunai yang sejalan dengan himbauan dari *World Health Organization* (WHO) dan pemerintah.

Pertumbuhan terendah pada bulan Mei 2020 sebesar -14,35 persen. Penyebabnya adalah menurunnya aktivitas ekonomi selama penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas transportasi berkurang drastis sedangkan penyumbang terbesar penggunaan *e-money* adalah sektor transportasi. Pada bulan berikutnya, Juni 2020 juga mengalami pertumbuhan negatif bahkan nominal terendah sepanjang periode sebesar Rp14,955,261,01.

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi pembayaran dan perluasan penggunaan layanan digital melalui berbagai kerja sama dengan Pemerintah, perbankan, *fintech*, dan *e-commerce* untuk membantu pemulihan perekonomian, khususnya program bantuan sosial diberikan pemerintah kepada masyarakat bagi yang terdampak Pandemi COVID-19, penyaluran kredit, dan digitalisasi UMKM. (Bank Indonesia, 2020a). Dengan demikian, tercatat transaksi *E-Money* mengalami peningkatan terus menerus dari bulan Juli 2020 semenjak terjadi pertumbuhan negatif tertinggi yang terjadi pada bulan Mei 2020.

Nominal tertinggi transaksi *E-Money* terjadi pada bulan September 2020 sebesar Rp27.637.429,70 akibat dilonggarkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah. Kebijakan tersebut mendorong aktivitas transaksi dan mobilitas masyarakat. Peningkatan tersebut juga menunjukkan mulai membaiknya perekonomian nasional. Secara lengkap perkembangan transaksi *e-money* dapat dilihat pada Gambar 8.2.

Gambar 8. 2
Pertumbuhan Transaksi *E-Money* Indonesia Tahun 2020-2021
Saat Pandemi COVID-19



Sumber: Bank Indonesia, Publikasi Bank Indonesia Tahun 2020-2021, data diolah

Perkembangan penggunaan transaksi *e-money* sebelum dan saat adanya pandemi, dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi digital tumbuh positif di berbagai instrumen dan *platform* pembiayaan di tengah Pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan *platform* dan

instrumen keuangan digital, seperti *e-commerce* untuk transaksi. (Bank Indonesia, 2020). Sebab, jenis transaksi dianggap lebih aman lantaran minim kontak langsung serta lebih praktis dan efisien dengan promo yang ditawarkan oleh *merchant* dan *e-commerce*.

BAB IX

KESIMPULAN

Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan mampu menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan inflasi dan neraca pembayaran, meningkatkan aktivitas konsumsi dan produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi Belanja Modal untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas publik, dan pengadaan infrastruktur yang menyentuh langsung kegiatan masyarakat dapat berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Apabila pemerintah kekurangan dana untuk melakukan perbelanjaan maka akan dilakukan berbagai macam kebijakan instrumen fiskal dan moneter.

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling efektif untuk mengalihkan sumber-sumber kepada pemerintah demi terselenggaranya investasi yang produktif. Pajak dan Belanja Modal dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Pembayaran non tunai meliputi Kartu Debit, Kartu Kredit dan E Money memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia baik sebelum maupun saat terjadinya pandemi COVID-19. Namun pada saat COVID 19 pembayaran menggunakan nontunai lebih meningkat dibandingkan pada saat sebelum COVID 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Keenam). STIE YKPN. <http://repository.ut.ac.id/3975/1/ESPA4324-M1.pdf>
- Arnone, M., & Bandiera, L. (2004). *Monetary Policy, Monetary Areas, and Financial Development with Electronic Money*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *PDB Triwulan Atas Dasar Harga Konstan 2010*. <http://bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *PDB Triwulan Atas Dasar Harga Konstan 2010*. <http://bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2020). *Data Uang Elektronik Bulanan Tahun 2015-2020*.
- Bank Indonesia. (2020). *Data APMK Bulanan Tahun 2015-2020*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2017). *Laporan Tahunan 2017*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan 2018*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2019). *Laporan Tahunan 2019*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan 2020*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2020*. <http://www.bi.go.id/>
- Bank for International Settlement. (1996). *Implication for Central Banks of the Development of Electronic Money*.
- Basuki, A. T. (2016). Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews). *Danisa Media*, 30–50.
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE.

- Chernick, H., Copeland, D., & Reschovsky, A. (2020). The Fiscal Effects of The Covid-19 Pandemic on Cities. *National Tax Journal*, 73(3), 699–732. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.3.04>
- Craig, A. C., & Hines, J. R. (2020). Taxes As Pandemic Controls. *National Tax Journal*, 73(4), 969–986. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.4.02>
- Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series. In *wiley* (Fourth Edi). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606885>
- Falianty, T. A. (2003). Tinjauan Terhadap Metode Ekonometrika Lanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 4(1), 59–74.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic Econometrics. In *The McGraw-Hill Companies* (Fifth Edit).
- Habib, A. S. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Sikap*, 3(1), 17–27.
- Harris, R., & Sollis, R. (2003). *Applied Time Series Modelling and Forecasting*. WILEY.
- Hidayat, A. (2006). *Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non-Tunai Melalui Pengembangan E-Money*.
- Jhingan, M. . (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers.
- Mangkoesebroto, G. (2017). *Ekonomi Publik* (Ketiga). BPFE-Yogyakarta.

- Nurlina, & Zurjani. (2018). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(2), 126–136. <https://doi.org/10.24114/qej.v2i3.17434>
- Nursanti, M. (2012). Tinjauan Penerimaan Pajak. *Menggali Pajak Sektor Pertambangan Migas Dan Non Migas*, 21–27.
- OECD. (2020). *Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience*. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-0braktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis
- OECD. (n.d.). *Tax Policy Reforms 2020: OECD and Selected Partner Economies*. Retrieved June 18, 2021, from <https://doi.org/10.1787/7af51916-en>
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat. *EKOBIS*, 20(1), 26–39.
- Pengaruh, A., Asli, P., Modal, B., Kerja, T., & Pertumbuhan, T. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.14795>
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century*. <https://doi.org/10.1017/ccol521633230>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1997). *Pooled Estimation of Long-Run Relationship in Dynamic Heterogeneous Panels*. 53(9), 1689–1699
- Richard, H. (1995). *Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling*. Prentice Hall.

- Romer, P. (1994). The origins of endogenous growth. *Journal of Economic Perspective*, 8(1), 3–22. <https://doi.org/10.4324/9780203443965.ch26>
- Stoilova, D. (2017). Tax Structure and Economic Growth: Evidence from the European Union. *Contaduria y Administracion*, 62(3), 1041–1057. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006>
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Edisi Kedu). Rajawali Pers.
- Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.84>
- Triastuti, D., & Pratomo, D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(1), 320–330.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Yunita, M., & Sentosa, S. U. (2019). Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 533–540.

Profil Penulis



Dr. Siti Rohima, SE, M.Si Pendidikan formal pada Strata S1 ditempuh pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya dan selesai tahun 1993. Melanjutkan Stara S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2009. Strata S3 ditempuh pada Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2013. Menjadi Dosen jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya sejak tahun 1996. Aktif diberbagai kajian penelitian, pengabdian dan penulisan jurnal. Penulis juga aktif sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Palembang periode 2022-2025 dan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan periode 2022-2027.



Dr. Abdul Bashir, SE, M.Si Lahir di Palembang, 12 Juni 1985. Pendidikan S1 diselesaikan pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Melanjutkan S2 dan S3 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Penulis merupakan Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diampu yaitu

Ekonomi SDA dan lingkungan, Ekonomi Publik, Keuangan Daerah. Aktif dalam berbagai penelitian dan menulis pada jurnal nasional maupun internasional.



Mardalena, SE, M.Si Lahir di Muara Enim, 21 April 1978. Pendidikan S1 diselesaikan pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya tahun 2000. Melanjutkan S2 pada PPS Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Pada tahun 2004 Saat ini sedang menepuh Program Doktor di Institut Pertanian Bogor. Menjadi Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas

Sriwijaya sejak tahun 2005. Aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian dan penulisan jurnal baik nasional maupun internasional.

ISBN 978-623-399-115-5

